BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kolaborasi dalam upaya pengembangan desa wisata berbasis adat yang dilakukan oleh Pemerintah Desa, BPD, Komunitas Adat Bonokeling dan Bumdes menghasilkan kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Kesepakatan
   - Perubahan nyata. Para elemen secara kolaboratif menginginkan adanya pemberdayaan ekonomi sehingga dengan adanya pengunjung dapat melariskan produk UMKM masyarakat setempat, disisi lain penetapan retribusi desa wisata dapat menambah pemasukan desa.
   - Kemitraan. Kesepakatan untuk pengembangan desa wisata berbasis adat, berbagai elemen masyarakat kemudian dilibatkan atau diikutsertakan untuk mengikuti pelatihan dan pembinaan SDM sadar wisata yang diadakan oleh Dinas Pemuda Olahraga Budaya Pariwisata (Dinporabudpar) Banyumas, dan outputnya para peserta pelatihan kemudian disatukan dalam satu wadah yang bernama Pokdarwis.
   - Orientasi hasil. Kesepakatan pengembangan desa wisata berbasis adat dapat dikatakan para stakeholder memiliki visi dan tujuan yang sama, hal ini dibuktikan dengan terbentuknya pokdarwis sebagai lembaga kemitraan, lalu dilanjutkan dengan uji coba penerapan tarif yang outputnya menginginkan terwujudnya desa wisata.
2. Pengelolaan

- Profesionalisme. Pengelolaan yang kolaboratif dalam proses pengembangan desa wisata berbasis adat, menunjukkan sikap profesional masing-masing pihak untuk mewujudkan desa wisata dalam jangka panjang, dan disisi lain tetap melanggengkan atau menjaga tatanan adat yang telah ada.
- Transparansi. Transparansi dalam pengelolaan kolaboratif hanya terdapat dikalangan elemen pemangku kepentingan, dan belum menyentuh pada seluruh lapisan masyarakat Desa.
- Komunikasi. Pengelolaan kolaborasi, masih terdapat miskomunikasi antara stakeholder terkait, disisi lain masih belum menyeluruhnya sosialisasi pengembangan desa wisata berbasis adat, sehingga hal ini tentunya menjadi harus menjadi evaluasi seluruh pihak.

3. Komitmen
   - Komitmen dalam kolaborasi pengembangan desa wisata berbasis adat, adalah tidak harus merubah adat yang telah berjalan. Dengan pengembangan desa wisata tersebut juga mereka harapkan dapat menjadi sarana pelanggengan atau pelestarian adat Bonokeling.
   - Aksi. Kegiatan untuk pengembangan masih berjalan lambat, hal ini disebabkan belum adanya support anggaran yang memadai. Adapun anggaran hanya mengandalkan APBDes yang dialokasikan ke Bumdes.
4. Pertanggungjawaban
   - Janji. Memanfaatkan hal seperti melayani sewa pakaian adat, menerapkan tarif bagi pengunjung, sekaligus sewa untuk penginapan,

dan kuliner untuk oleh-oleh. Belum memperlihatkan hasil yang signifikan karena masih terdapat pro kontra dikalangan anak putu Bonokeling.

- Kejelasan. Masih kurangnya sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat terkait tentang adanya rencana pengembangan desa wisata masih menjadi permasalahan yang harus diselesaikan. Memasifkan sosialisasi dan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai desa wisata, tentu akan berbeda dibanding dengan hanya mensosialisasikan rencana pengembangan desa wisata itu kepada RT ataupun kepada masyarakat-masyarakat tertentu.
- Kinerja. Pertanggungjawaban dalam hal kinerja pada proses kolaborasi pengembangan desa wisata berbasis adat dapat dikatakan cukup baik, walaupun berkurangnya motivasi kinerja karena adanya penilaian yang tidak mereka harapkan. Selain itu, meski sumber daya manusia yang ada di Desa Pekuncen itu tidak semuanya memiliki jenjang pendidikan formal yang memadai, akan tetapi secara organisasi kebudayaan mereka memiliki solidaritas, motivasi, dan kinerja yang tinggi.
- Pengukuran. Pertanggungjawaban dalam hasil proses kolaborasi pengembangan desa wisata dapat dikatakan seimbang. Hal itu dikarenakan melalui adanya tindakan real dengan keterlibatan pokdarwis pada perlon unggahan menunjukkan hasil yang baik, disisi lain dibekukannya untuk sementara kegiatan pokdarwis menunjukkan hasil yang buruk.

5. Faktor pendukung Collaborative Governance dalam pengembangan desa wisata berbasis adat pada Komunitas Bonokeling Desa Pekuncen Kecamatan Jatilawang adalah Dukungan anggaran dari APBDes, adanya dukungan dan pembinaan dari instansi vertikal. Kemudian faktor penghambatnya adalah, minim dan kurangnya kesiapan SDM, terbatasnya sarana dan prasarana penunjang, serta persepsi negatif masyarakat luar desa dan minimnya pengetahuan masyarakat desa mengenai desa wisata

B. Saran

Saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Kesepakatan. Dalam proses kolaborasi pengembangan desa wisata kesepakatan belum melibatkan seluruh masyarakat, dan hanya melibatkan pemangku kepentingan. Sehingga untuk mendukung terwujudnya proses kolaborasi yang baik, maka harus ada kesepakatan dari seluruh lapisan masyarakat.
2. Pengelolaan. Dalam proses kolaborasi pengembangan desa wisata berbasis adat. Seluruh stakeholder terkait perlu untuk meningkatkan koordinasi agar tidak terjadi *miss*-komunikasi.
3. Komitmen. Dalam proses kolaborasi pengembangan desa wisata berbasi adat, dengan lambannya aksi kolaborasi pengembangan desa wisata, karena belum memadainya support anggaran yang hanya mengandalkan APBDes. Pemangku kepentingan yang berkolaborasi perlu menggandeng pihak swasta atau investor untuk memberikan modal dalam meningkatkan sarana penunjang wisata atau daya dukung wisata. Misalnya pengembangan UMKM, ataupun menggali potensi wisata buatan di Desa Pekuncen, dimana adat tetap menjadi daya tarik

utama.

4. Pertanggungjawaban. Dalam proses kolaborasi pengembangan desa wisata, melalui upaya yang telah berjalan para pemangku kepentingan perlu untuk meningkatkan sosialisasi serta edukasi mengenai desa wisata berbasis adat kepada warga setempat, serta meningkatkan publikasi atau promosi kegiatan-kegiatan adat untuk memberikan persepsi positif mengenai adat Bonokeling kepada masyarakat luar desa.
5. Bagi masyarakat setempat sebagai sasaran pelaksanaan kolaborasi, harus ikut berperan dan berkontribusi aktif, sehingga keberhasilan pelaksanaan kolaborasi dengan tujuan pengembangan desa wisata dapat berjalan dengan maksimal. Dan masyarakat juga harus sadar bahwa pelaksanaan kolaborasi pengembangan desa wisata ini, adalah pemberdayaan untuk meningkatkan pendapatan ekonomi dan masyarakat akan menerima manfaatnya.